

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2021**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Painan, Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan,



NIP.19670723 199512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
I. Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
II. Sekilas Tentang SPIP.....	6
A. Pengertian SPIP.....	6
B. Tujuan SPIP.....	6
C. Unsur-unsur SPIP.....	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	9
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	10
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik.....	10
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.....	10
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	12
IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian.....	14
A. Pernyataan Tujuan.....	14
B. Risiko-risiko.....	15
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	18
D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	19
V. Informasi dan Komunikasi.....	20
VI. Pemantauan dan Evaluasi.....	21
VII. Penutup.....	23
Lampiran	

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan atau penyimpangan dan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2021.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset Negara atau daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (irama atau gaya kepemimpinan), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan, dan mengolah data sehingga

menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri /Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang

sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur - unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan;

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ; Seluruh lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu

melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai

6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
		Kode etik secara rutin akan dimutakhirkan
		Pendapatan pegawai akan disesuaikan dengan kinerjanya
		Dokumen Pernyataan Kode etik akan disampaikan berupa surat edaran dari Bupati kepada seluruh pegawai

		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun akan diinformasikan kepada pihak ketiga melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Media organisasi (papan pengumuman dan situs resmi) akan digunakan untuk menginformasikan pelaksanaan kode etik
2	Komitmen Terhadap Kompetensi;	seluruh pegawai secara rutin akan menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku di OPD Pernyataan Kode etik akan dibaca oleh semua pegawai melalui papan pengumuman dan website Disdikbud
		Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai
		Melakukan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai
		pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan etika organisasi
		Pelanggaran kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik
		Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Proses seleksi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya

3	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat;	Kewenangan direviu secara periodik
		Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
5	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;	Akan dilaksanakan program pendidikan tambahan berupa Workshop untuk menambah SDM pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dilakukannya Evaluasi kinerja manajemen untuk seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan . Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2021, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

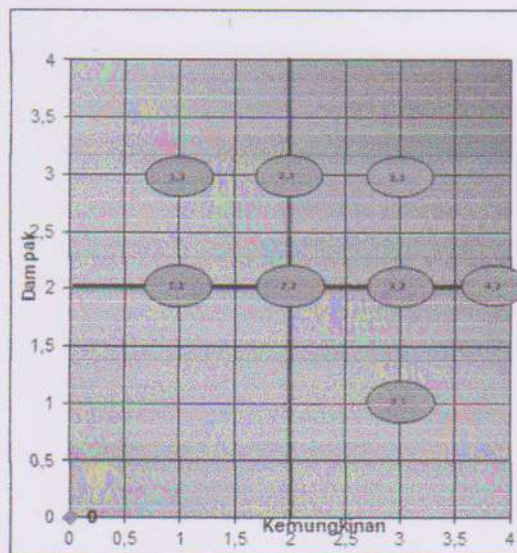
Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Masih kurangnya ruang kelas baru pada Sekolah Dasar
- Masih kurangnya ruang pustaka pada Sekolah Dasar
- Masih kurangnya pagar dan wc pada Sekolah Dasar
- Masih adanya ruang kelas SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih adanya ruang guru SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih adanya ruang pustaka SD yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih adanya jamban SD dan tempat ibadah yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih adanya rumah dinas kepala SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih kurangnya meja dan kursi siswa pada Sekolah Dasar
- Masih kurangnya penyediaan perlengkapan pada Sekolah Dasar
- Masih kurangnya alat laboratorium dan alat peraga praktik pada Sekolah Dasar
- Masih kurangnya ruang laboratorium komputer, toilet/wc, gerbang sekolah dan pagar pada sekolah-sekolah di kabupaten pessel

- Masih adanya ruang belajar, jamban, ruang ibadah dan rumah dinas guru SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih adanya ruang kelas SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih adanya ruang multimedia dan ruang keterampilan SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki
- Masih kurangnya peralatan laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama
- Masih kurangnya pengadaan marching band dan komputer pc pada Sekolah Menengah Pertama
- Masih kurangnya gedung/ruang kelas/ruang guru paud
- Masih kurangnya area bermain siswa dan rusaknya toilet guru
- Masih kurangnya APE siswa di sekolah TK dan PAUD
- Masih kurangnya APE siswa non formal/kesetaraan
- Masih kurangnya alat angkutan laut dan BBM
- Masih adanya guru SD yang belum menguasai teknologi informasi, seperti mengakses akun youtube
- Adanya perbedaan pemahaman pengawas SD dalam menjalankan tugasnya
- Tidak semua sekolah mengirimkan data peserta lomba
- Masih rendahnya penguasaan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru, pengawas dan kepala sekolah
- Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang belum sesuai dengan aturan
- Lambatnya pencairan dana BOS sekolah SD
- Guru SD tidak menguasai pengelolaan keuangan BOS secara spesifik
- Masih adanya guru SMP yang belum menguasai teknologi informasi, seperti mengakses akun youtube
- Tidak semua sekolah mengirimkan data peserta lomba
- Masih rendahnya SDM tim seleksi bahan sertifikasi guru - guru profesional pada satuan pendidikan dasar
- Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang belum sesuai dengan aturan
- Lambatnya pencairan dana BOS sekolah SMP
- Guru SMP tidak menguasai pengelolaan keuangan BOS secara spesifik

- Meningkatnya angka stunting pada beberapa keluarga di kabupaten pessel
- Masih ada operator PAUD yang belum memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan Dapodik
- Tidak semua lembaga PAUD yang menerima BOP
- Masih adanya anak yang putus sekolah pada jenjang SMA
- Pola pembelajaran yang monoton dan masih manual
- Tidak semua lembaga Nonformal yang menerima BOP
- Masih rendahnya sdm guru SD dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang baik dan benar
- Masih rendahnya mutu sdm guru PAUD dan pendidik nonformal dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang baik dan benar
- Penyaluran tenaga pendidik dan kependidikan yang efisien tidak tepat sasaran
- Kurangnya penerapan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari
- Masih ditemukan benda-benda cagar budaya di kabupaten pessel yang mengalami kerusakan dan minimnya pemahaman masyarakat dan juru pelihara terhadap pentingnya nilai/objek cagar budaya

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut:



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2.

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan . Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang dan belum efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring ke sekolah terkait
- Minta bantuan kepada rekan guru yang menguasai TI
- Penilaian Dokumen KTSP SD sesuai dengan juknis
- Membuat surat edaran lomba
- Mendatangkan tutor yang kompeten dari luar daerah
- Membuat surat edaran PPDB
- Proses pencairan dana BOS harus tepat waktu
- Adanya juknis BOS
- Minta bantuan kepada rekan guru yang menguasai TI
- Membuat surat edaran lomba
- Pembentukan Tim seleksi / Verifikasi bahan atau dokumen sertifikasi
- Membuat surat edaran PPDB
- Proses pencairan dana BOS harus tepat waktu
- Adanya juknis BOS
- Melaksanakan pelatihan-pelatihan
- Pengisian dapodik paud tepat waktu
- Penerima bantuan sesuai dengan juknis BOP dan pendidikan kesetaraan
- Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar siswa
- Pelaksanaan bimtek
- Penerima bantuan sesuai dengan juknis BOP dan pendidikan kesetaraan
- Menyusun RPP dan silabus kurikulum muatan local
- Adanya materi dan silabus
- data manual guru persekolah
- Praktek pembuatan Bungo Jamba yang hampir punah

- Monitoring ke lokasi cagar budaya

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

- Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Pelatihan bagi guru-guru SD tentang akses dan penggunaan teknologi informasi
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan bimtek pengawas
- Pengawasan dan penegasan pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa di SD
- Mereview hasil bimtek
- Pelaksanaan penerimaan PPDB SD sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku
- Pengawasan oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SD
- Pemantauan langsung dari kepala sekolah dan Operator BOS Kabupaten
- Pelatihan bagi guru-guru SMP tentang akses dan penggunaan teknologi informasi
- Pengawasan dan penegasan pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa di SMP
- Upaya kabid GTK untuk mempermudah kerja tim dalam verifikasi bahan sertifikasi
- Pelaksanaan penerimaan PPDB SMP sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku
- Pengawasan oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SMP
- Pemantauan langsung dari kepala sekolah dan Operator BOS Kabupaten
- Upaya pemantauan dan pengawasan langsung dari pimpinan
- Perlunya pengawasan dari kepala sekolah saat mengentrikan data-data sekolah dengan cepat, tepat, dan akurat
- Upaya kabid PAUD Dikmas untuk mengusulkan tambahan dana untuk penerima bantuan
- Pengawasan dan penegasan dari kepala Opd kepada pihak-pihak terkait dalam menurunkan angka putus sekolah di kabupaten pessel
- Mengevaluasi hasil pelatihan dan bimtek peningkatan kompetensi guru
- Upaya kabid PAUD Dikmas untuk mengusulkan tambahan dana untuk penerima

bantuan

- Mengevaluasi hasil pelatihan guru Muatan local
- Melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum PAUD dan Nonformal
- Penyediaan data profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- Upaya Kabid Budaya untuk melakukan Kerja sama dengan Ninik Mamak/LKAM dan Pihak sekolah
- Memasang alat CCTV di lokasi agar bisa dipantau setiap saat, melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya, dan mengadakan bimtek peningkatan juru pelihara cagar budaya

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Pelatihan bagi guru-guru SD tentang akses dan penggunaan teknologi informasi
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan bimtek pengawas
- Pengawasan dan penegasan pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa di SD
- Mereview hasil bimtek
- Pelaksanaan penerimaan PPDB SD sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku
- Pengawasan oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SD
- Pemantauan langsung dari kepala sekolah dan Operator BOS Kabupaten

- Pelatihan bagi guru-guru SMP tentang akses dan penggunaan teknologi informasi
- Pengawasan dan penegasan pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa di SMP
- Upaya kabid GTK untuk mempermudah kerja tim dalam verifikasi bahan sertifikasi
- Pelaksanaan penerimaan PPDB SMP sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku
- Pengawasan oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SMP
- Pemantauan langsung dari kepala sekolah dan Operator BOS Kabupaten
- Upaya pemantauan dan pengawasan langsung dari pimpinan
- Perlunya pengawasan dari kepala sekolah saat mengentrikan data-data sekolah dengan cepat, tepat, dan akurat
- Upaya kabid PAUD Dikmas untuk mengusulkan tambahan dana untuk penerima bantuan
- Pengawasan dan penegasan dari kepala Opd kepada pihak-pihak terkait dalam menurunkan angka putus sekolah di kabupaten pessel
- Mengevaluasi hasil pelatihan dan bimtek peningkatan kompetensi guru
- Upaya kabid PAUD Dikmas untuk mengusulkan tambahan dana untuk penerima bantuan
- Mengevaluasi hasil pelatihan guru Muatan local
- Melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum PAUD dan Nonformal
- Penyediaan data profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- Upaya Kabid Budaya untuk melakukan Kerja sama dengan Ninik Mamak/LKAM dan Pihak sekolah
- Memasang alat CCTV di lokasi agar bisa dipantau setiap saat, melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya, dan mengadakan bimtek peningkatan juru pelihara cagar budaya.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk

meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau

yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan . Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Menyusun kode etik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004	OPD	2021
		Kode etik secara rutin akan dimutakhirkan	OPD	2021
		Pendapatan pegawai akan disesuaikan dengan kinerjanya	BPKAD	2021
		Dokumen Pernyataan Kode etik akan disampaikan berupa surat edaran dari Bupati kepada seluruh pegawai	BKD	November
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	OPD	2021
		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun akan diinformasikan kepada pihak ketiga melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OPD	Oktober
		Media organisasi (papan pengumuman dan situs resmi) akan digunakan untuk menginformasikan pelaksanaan kode etik	OPD	November
		seluruh pegawai secara rutin akan menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku di OPD	OPD	2021
		Pernyataan Kode etik akan dibaca oleh semua pegawai melalui papan pengumuman dan website Disdikbud	OPD	2021
		Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai	OPD	2021
		Melakukan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai	OPD	2021
		pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan etika organisasi	OPD	November
		Pelanggaran kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	OPD	November
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik	Bawasda	2021
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	OPD	November
		Proses seleksi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi	BKD	2021
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	BKD	2021
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya	BKD	2021

LAMPIRAN II

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan				
1	Masih kurangnya ruang kelas baru pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan SD	1.Padatnya jumlah penduduk usia sekolah ; 2.Keterbatasan dana	Masih banyak ditemukan SD yang menerapkan sistem double shift
2	Masih kurangnya ruang pustaka pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan
3	Masih kurangnya pagar dan wc pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Terpenuhinya pagar dan wc sekolah dasar secara bertahap
4	Masih adanya ruang kelas SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Masih banyak ditemukan SD yang menerapkan sistem double shift
5	Masih adanya ruang guru SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Terlaksananya rehab ruang guru beserta perabot untuk 5 unit Sekolah dasar
6	Masih adanya ruang pustaka SD yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Terlaksananya rehab ruang perpustakaan untuk 5 unit Sekolah dasar
7	Masih adanya jamban SD dan tempat ibadah yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Terpenuhinya rehab jamban dan tempat ibadah SD secara bertahap
8	Masih adanya rumah dinas kepala SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Terlaksananya rehab rumah Dinas Kepala Sekolah untuk 6 unit Sekolah dasar
9	Masih kurangnya meja dan kursi siswa pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan SD	1.Kurangnya pemerataan dalam pendistribusian meja dan kursi; 2.Keterbatasan Dana	Terpenuhinya mebeleur SD secara bertahap tergantung dana bantuan yang diperoleh dari APBD atau APBN
10	Masih kurangnya penyediaan perlengkapan pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan SD	1.Kurangnya pemerataan dalam pendistribusian perlengkapan SD;2.Keterbatasan Dana	Terpenuhinya perlengkapan SD secara bertahap tergantung dana bantuan yang diperoleh dari APBD atau APBN
11	Masih kurangnya alat laboratorium dan alat peraga praktik pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan SD	1.Kurangnya pemerataan dalam pendistribusian perlengkapan siswa SD;2.Keterbatasan Dana	Terpenuhinya perlengkapan siswa SD secara bertahap tergantung dana bantuan yang diperoleh dari APBD atau APBN
12	Masih kurangnya ruang laboratorium komputer, toilet/wc, gerbang sekolah dan pagar pada sekolah-sekolah di kabupaten pessel	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Keterbatasan dana	Terpenuhinya sarana,prasarana,dan utilitas SMP secara bertahap
13	Masih adanya ruang belajar, jamban, ruang ibadah dan rumah dinas guru SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Keterbatasan dana	Terlaksananya rehab ruang belajar, jamban, ruang ibadah dan rumah dinas guru untuk 31 unit SMP
14	Masih adanya ruang kelas SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Keterbatasan dana	Masih banyak ditemukan SMP yang menerapkan sistem double shift
15	Masih adanya ruang multimedia dan ruang keterampilan SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Keterbatasan dana	Terpenuhinya rehab ruang multimedia dan ruang keterampilan SMP secara bertahap
16	Masih kurangnya peralatan laboratorium IPA pada Sekolah Mengah Pertama	Kepala Bidang Pembinaan SMP	1.Kurangnya pemerataan dalam pendistribusian perlengkapan SMP;2.Keterbatasan Dana	Terpenuhinya perlengkapan SMP secara bertahap tergantung dana bantuan yang diperoleh dari APBD atau APBN
17	Masih kurangnya pengadaan marching band dan komputer pc pada Sekolah Mengah Pertama	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Keterbatasan dana	Terpenuhinya alat praktik dan peraga SMP secara bertahap tergantung dana bantuan yang diperoleh dari APBD atau APBN
18	Masih kurangnya gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	1.Padatnya jumlah penduduk anak usia 5-6 tahun ; 2.Keterbatasan dana	Pelaksanaan pembangunan gedung PAUD dilakukan secara bertahap mengingat dana yang terbatas
19	Masih kurangnya area bermain siswa dan rusaknya toilet guru	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Keterbatasan dana	Terpenuhinya pembangunan area bermain dan rehab jamban pada 2 unit sekolah
20	Masih kurangnya APE siswa di sekolah TK dan PAUD	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Keterbatasan dana	Terpenuhinya APE siswa untuk 2 unit sekolah
21	Masih kurangnya APE siswa non formal/kesetaraan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Keterbatasan dana	Terpenuhinya APE siswa nonformal/kesetaraan secara bertahap
22	Masih kurangnya alat angkutan laut dan BBM	Kepala Bidang Pembinaan SD	Keterbatasan dana	Tersedianya alat transportasi laut untuk siswa SD dan SMP yang berada di kenagarian Sungai Nyalo kecamatan Koto XI Tarusan

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
23	Masih adanya guru SD yang belum menguasai teknologi informasi, seperti mengakses akun youtube	Kepala Bidang Pembinaan SD	Rendahnya sdm guru SD di bidang Teknologi Informasi	Ada Beberapa sekolah yang perlu meminta bantuan tenaga lain yang paham dengan TI
24	Adanya perbedaan pemahaman pengawas SD dalam menjalankan tugasnya	Kepala Bidang Pembinaan SD	Beberapa pegawai tidak bekerja berdasarkan tupoksi yang ada	Terlaksana Bimtek pengawas SD dengan baik dan benar sesuai dengan tupoksi pengawas
25	Tidak semua sekolah mengirimkan data peserta lomba	Kepala Bidang Pembinaan SD	Kurangnya pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa SD	Rendahnya prestasi siswa di bidang non akademik
26	Masih rendahnya penguasaan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru, pengawas dan kepala sekolah	Kepala Bidang GTK	Kurangnya SDM guru dalam Kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional	Lulusan peserta Bimtek yang menguasai kompetensi profesional
27	Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang belum sesuai dengan aturan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Tim PPDB sekolah belum paham dengan juknis PPDB	Terselenggaranya penerimaan PPDB yang belum efektif
28	Lambatnya pencairan dana BOS sekolah SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	Guru belum paham tentang juknis BOS	Ada beberapa peserta yang kurang serius mengikuti bimtek, sehingga apa yang diharapkan kurang tercapai
29	Guru SD tidak menguasai pengelolaan keuangan BOS secara spesifik	Kepala Bidang Pembinaan SD	Masih ada guru yang belum paham tentang juknis BOS	Ada beberapa peserta yang kurang serius mengikuti bimtek, sehingga apa yang diharapkan kurang tercapai
30	Masih adanya guru SMP yang belum menguasai teknologi informasi, seperti mengakses akun youtube	Kepala Bidang Pembinaan SD	Rendahnya sdm guru SMP di bidang Teknologi Informasi	Ada Beberapa sekolah yang perlu meminta bantuan tenaga lain yang paham dengan TI
31	Tidak semua sekolah mengirimkan data peserta lomba	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kurangnya pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa SMP	Rendahnya prestasi siswa di bidang non akademik
32	Masih rendahnya SDM tim seleksi bahan sertifikasi guru guru profesional pada satuan pendidikan dasar	Kepala Bidang GTK	Dana yang tersedia kurang memadai	Dokumen bahan sertifikasi guru tidak dapat dipastikan sesuai dengan petunjuk teknis
33	Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang belum sesuai dengan aturan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Tim PPDB sekolah belum paham dengan juknis PPDB	Penyelenggaraan penerimaan PPDB yang belum efektif
34	Lambatnya pencairan dana BOS sekolah SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Guru belum paham tentang juknis BOS	Ada beberapa peserta yang kurang serius mengikuti bimtek, sehingga apa yang diharapkan kurang tercapai
35	Guru SMP tidak menguasai pengelolaan keuangan BOS secara spesifik	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Masih ada guru yang belum paham tentang juknis BOS	Ada beberapa peserta yang kurang serius mengikuti bimtek, sehingga apa yang diharapkan kurang tercapai
36	Meningkatnya angka stunting pada beberapa keluarga di kabupaten pessel	Kepala Bidang GTK	Masih rendahnya pemahaman mengenai Program Pendidikan Keluarga dengan sasaran penurunan angka stunting dengan pola adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	Penurunan angka stunting dengan pola AKB di kabupaten pessel secara bertahap
37	Masih ada operator PAUD yang belum memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan Dapodik	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Sering terjadi penggantian operator di lembaga PAUD	Terlaksananya pelatihan PAUD yang tepat waktu dan tepat sasaran
38	Tidak semua lembaga PAUD yang menerima BOP	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Keterbatasan dana	Tersalurkan dana bantuan penyelenggaraan operasional (BOP) untuk PAUD yang memenuhi persyaratan
39	Masih adanya anak yang putus sekolah pada jenjang SMA	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	1.Tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah; 2. Faktor lingkungan	Rendahnya APK Siswa di jenjang SMA
40	Pola pembelajaran yang monoton dan masih manual	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Rendahnya SDM pengajar non formal dalam menggunakan media teknologi	Belum tercapainya standar AKM pada siswa non formal
41	Tidak semua lembaga Nonformal yang menerima BOP	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Keterbatasan kuota peserta yang diakibatkan karena terbatasnya dana	Lulusan peserta paket B dan C secara bertahap
42	Masih rendahnya sdm guru SD dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang baik dan benar	Kepala Bidang SD	Masih ada guru-guru yang berbeda pemahaman dalam menyusun kurikulum Muatan Lokal	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan baik dan benar sesuai dengan kearifan lokal yang mempunyai dasar hukum dari pemerintah daerah
43	Masih rendahnya mutu sdm guru PAUD dan pendidik nonformal dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang baik dan benar	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Beberapa guru tidak memahami materi dan silabus penyusunan kurikulum	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan baik dan benar sesuai dengan kearifan lokal yang mempunyai dasar hukum dari pemerintah daerah
44	Penyaluran tenaga pendidik dan kependidikan yang efisien tidak tepat sasaran	Kepala Bidang GTK	Ditemukan beberapa guru dengan mapel yang sama disekolah yang sama	Belum tercapai tujuan pemerataan guru yang efisien dan tepat sasaran
45	Kurangnya penerapan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari	Kepala Bidang Budaya	Tidak semua guru SMP yang mengikuti sosialisasi pemahaman nilai-nilai budaya	Menghasilkan Kepala Sekolah dan guru yang mampu menerapkan Pendidikan karakter yang berbasis kebudayaan kepada peserta didik dengan mengemas bahan ajar pada kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran yang

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
46	Masih ditemukan benda-benda cagar budaya di kabupaten pessel yang mengalami kerusakan dan minimnya pemahaman masyarakat dan juru pelihara terhadap pentingnya nilai/objek cagar budaya	Kepala Bidang Budaya	Keterbatasan dana untuk biaya pemeliharaan	Terlaksana pemeliharaan objek cagar budaya di kabupaten pessel secara bertahap

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ Rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung Jawab Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3		4	5
Tujuan I : Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan					
1	Masih kurangnya ruang kelas baru pada Sekolah Dasar	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
2	Masih kurangnya ruang pustaka pada Sekolah Dasar	Upaya untuk menggunakan dana Pokir	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
3	Masih kurangnya pagar dan wc pada Sekolah Dasar	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
4	Masih adanya ruang kelas SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
5	Masih adanya ruang guru SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
6	Masih adanya ruang pustaka SD yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
7	Masih adanya jamban SD dan tempat ibadah yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
8	Masih adanya rumah dinas kepala SD beserta perabot yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
9	Masih kurangnya meja dan kursi siswa pada Sekolah Dasar	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
10	Masih kurangnya penyediaan perlengkapan pada Sekolah Dasar	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
11	Masih kurangnya alat laboratorium dan alat peraga praktik pada Sekolah Dasar	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
12	Masih kurangnya ruang laboratorium komputer, toilet/wc, gerbang sekolah dan pagar pada sekolah sekolah di kabupaten pessel	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
13	Masih adanya ruang belajar, jamban, ruang ibadah dan rumah dinas guru SMP yang rusak/tidak layak	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
14	Masih adanya ruang kelas SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
15	Masih adanya ruang multimedia dan ruang keterampilan SMP yang rusak/tidak layak pakai sehingga perlu diperbaiki	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
16	Masih kurangnya peralatan laboratorium IPA pada Sekolah Mengah Pertama	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
17	Masih kurangnya pengadaan marching band dan komputer pc pada Sekolah Mengah Pertama	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
18	Masih kurangnya gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
19	Masih kurangnya area bermain siswa dan rusaknya toilet guru	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ Rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung Jawab Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3		4	5
20	Masih kurangnya APE siswa di sekolah TK dan PAUD	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
21	Masih kurangnya APE siswa non formal/kesetaraan	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
22	Masih kurangnya alat angkutan laut dan BBM	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal bantuan sarpras ke daerah pusat	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
23	Masih adanya guru SD yang belum menguasai teknologi informasi, seperti mengakses akun youtube	Minta bantuan kepada rekan guru yang menguasai TI	Meningkatkan kompetensi guru dibidang TI	Kepala Bidang Pembinaan SD	Februari- November
24	Adanya perbedaan pemahaman pengawas SD dalam menjalankan tugasnya	Penilaian Dokumen KTSP SD sesuai dengan juknis	Pelaksanaan bimtek secara berkala	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
25	Tidak semua sekolah mengirimkan data peserta lomba	Membuat surat edaran lomba	Peningkatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
26	Masih rendahnya penguasaan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru, pengawas dan kepala sekolah	Mendatangkan tutor yang kompeten dari luar daerah	Peningkatan kompetensi profesional guru	Kepala Bidang GTK	Januari- Desember
27	Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang belum sesuai dengan aturan	Membuat surat edaran PPDB	Keseragaman dalam memberikan layanan penerimaan PPDB SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
28	Lambatnya pencairan dana BOS sekolah SD	Proses pencairan dana BOS harus tepat waktu	Percepatan proses pencairan dana BOS	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
29	Guru SD tidak menguasai pengelolaan keuangan BOS secara spesifik	Adanya juknis BOS	Melaksanakan bimtek secara berkala	Kepala Bidang Pembinaan SD	Januari- Desember
30	Masih adanya guru SMP yang belum menguasai teknologi informasi, seperti mengakses akun youtube	Minta bantuan kepada rekan guru yang menguasai TI	Meningkatkan kompetensi guru dibidang TI	Kepala Bidang Pembinaan SD	Februari-November
31	Tidak semua sekolah mengirimkan data peserta lomba	Membuat surat edaran lomba	Peningkatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
32	Masih rendahnya SDM tim seleksi bahan sertifikasi guru - guru profesional pada satuan pendidikan dasar	Pembentukan Tim seleksi / Verifikasi bahan atau dokumen sertifikasi	Percepatan waktu Tim seleksi dalam memverifikasi bahan/dokumen sertifikasi	Kepala Bidang GTK	April,Juli, Oktober, Desember
33	Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang belum sesuai dengan aturan	Membuat surat edaran PPDB	Keseragaman dalam memberikan layanan penerimaan PPDB SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
34	Lambatnya pencairan dana BOS sekolah SMP	Proses pencairan dana BOS harus tepat waktu	Percepatan proses pencairan dana BOS	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
35	Guru SMP tidak menguasai pengelolaan keuangan BOS secara spesifik	Adanya juknis BOS	Melaksanakan bimtek secara berkala	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Januari- Desember
36	Meningkatnya angka stunting pada beberapa keluarga di kabupaten pessel	Melaksanakan pelatihan-pelatihan	Upaya untuk menurunkan angka stunting di kabupaten pessel	Kepala Bidang GTK	Januari- Desember
37	Masih ada operator PAUD yang belum memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan Dapodik	Pengisian dapodik paud tepat waktu	Pelaksanaan pelatihan Dapodik Paud secara berkala	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
38	Tidak semua lembaga PAUD yang menerima BOP	Penerima bantuan sesuai dengan juknis BOP dan pendidikan kesetaraan	Pemerataan dalam penyaluran bantuan BOP Paud	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
39	Masih adanya anak yang putus sekolah pada jenjang SMA	Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar siswa	Sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya wajar 9 tahun	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
40	Pola pembelajaran yang monoton dan masih manual	Pelaksanaan bimtek	Pelaksanaan pelatihan dan diklat secara berkala	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
41	Tidak semua lembaga Nonformal yang menerima BOP	Penerima bantuan sesuai dengan juknis BOP dan pendidikan kesetaraan	Pemerataan dalam penyaluran bantuan BOP Kesetaraan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
42	Masih rendahnya sdm guru SD dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang baik dan benar	Menyusun RPP dan silabus kurikulum muatan lokal	Melaksanakan pelatihan guru muatan lokal secara berkala	Kepala Bidang SD	Januari- Desember
43	Masih rendahnya mutu sdm guru PAUD dan pendidik nonformal dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang baik dan benar	Adanya materi dan silabus	Meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam menyusun kurikulum muatan lokal	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Januari- Desember
44	Penyaluran tenaga pendidik dan kependidikan yang efisien tidak tepat sasaran	data manual guru persekolah	Tersedianya database penyebaran dan pemerataan guru	Kepala Bidang GTK	Januari- Desember
45	Kurangnya penerapan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari	Praktek pembuatan Bungo Jamba yang hampir punah	Adanya Buku pedoman dalam proses pembelajaran ABS-SBK	Kepala Bidang Budaya	Triwulan 1

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ Rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung Jawab Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3		4	5
46	Masih ditemukan benda-benda cagar budaya di kabupaten pessel yang mengalami kerusakan dan minimnya pemahaman masyarakat dan juru pelihara terhadap pentingnya nilai/objek cagar budaya	Monitoring ke lokasi cagar budaya	Melakukan monitoring pemeliharaan cagar budaya secara berkala	Kepala Bidang Budaya	Februari-Desember

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Pengendalian Yg Direncanakan	Media/Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
Tujuan I : Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan					
1	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
2	Upaya untuk menggunakan dana Pokir	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
3	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
4	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
5	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
6	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
7	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
8	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
9	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
10	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
11	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
12	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
13	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
14	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
15	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
16	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
17	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
18	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
19	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga PAUD	Januari-Desember
20	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga PAUD	Januari-Desember
21	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Instrument pendataan, Instruksi Pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga Nonformal	Januari-Desember
22	Melakukan Monitoring ke sekolah terkait	Pengajuan proposal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
23	Minta bantuan kepada rekan guru yang menguasai TI	Rapat, surat edaran, grup Whatsapp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Februari-November
24	Penilaian Dokumen KTSP SD sesuai dengan juknis	Rapat, surat edaran, bimtek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
25	Membuat surat edaran lomba	Surat edaran lomba, Rapat Tahunan, FDS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
26	Mendatangkan tutor yang kompeten dari luar daerah	Rapat, surat edaran, bimtek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
27	Membuat surat edaran PPDB	Rapat, surat edaran, grup Whatsapp, website diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember
28	Proses pencairan dana BOS harus tepat waktu	Rapat, surat edaran, bimtek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari-Desember

29	Adanya juknis BOS	Rapat, surat edaran, bimtek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari- Desember
30	Minta bantuan kepada rekan guru yang menguasai TI	Rapat, surat edaran, grup Whatsapp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Februari- November
31	Membuat surat edaran lomba	Surat edaran lomba, Rapat Tahunan, EDS, website diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari- Desember
32	Pembentukan Tim seleksi / Verifikasi bahan atau dokumen sertifikasi	Rapat, Instruksi pimpinan, grup Whatsapp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	April, Juli, Oktober, Desember
33	Membuat surat edaran PPDB	Surat edaran PPDB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari- Desember
34	Proses pencairan dana BOS harus tepat waktu	Rapat, surat, notulen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari- Desember
35	Adanya juknis BOS	Rapat, surat edaran, bimtek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah	Januari- Desember
36	Melaksanakan pelatihan-pelatihan	Rapat, surat edaran, grup Whatsapp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Pendidik PAUD, SD, SMP dan Tendik Lembaga IKP/PKBM	Januari- Desember
37	Pengisian dapodik paud tepat waktu	Rapat, surat edaran, grup Whatsapp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Operator Dapodik PAUD	Januari- Desember
38	Penerima bantuan sesuai dengan juknis BOP dan pendidikan kesetaraan	Surat edaran, instruksi pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga PAUD	Januari- Desember
39	Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar siswa	Surat edaran, monev	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Siswa	Januari- Desember
40	Pelaksanaan bimtek	Rapat, surat edaran, website diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru PAUD	Januari- Desember
41	Penerima bantuan sesuai dengan juknis BOP dan pendidikan kesetaraan	Surat edaran, instruksi pimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga Nonformal	Januari- Desember
42	Menyusun RPP dan silabus kurikulum muatan lokal	Surat edaran, pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru SD	Januari- Desember
43	Adanya materi dan silabus	Rapat, surat edaran, grup whatsapp	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru PAUD	Januari- Desember
44	data manual guru persekolah	Surat edaran, website diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kabupaten Pessel	Januari- Desember
45	Praktek pembuatan Bungo Jamba yang hampir punah	Rapat, Surat edaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru SMP Kabupaten Pessel	Triwulan 1
46	Monitoring ke lokasi cagar budaya	Survei dan Monitoring	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Masyarakat, juru pelihara	Februari- Desember

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
2		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
3		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
4		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
5		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
6		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
7		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
8		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
9		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
10		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
11		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
12		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
13		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
14		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
15		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
16		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
17		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
18		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
19		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
20		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
21		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
22		Upaya untuk menambah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
23		Pelatihan bagi guru-guru SD tentang akses dan penggunaan teknologi informasi	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
24		Mengevaluasi hasil pelaksanaan bimtek pengawas	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
25		Pengawasan dan penegasan pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa di SD	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
26		Mereview hasil bimtek	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang GTK	Mulai dari awal tahun
27		Pelaksanaan penerimaan PPDB SD sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
28		Pengawasan oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SD	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
29		Pemantauan langsung dari kepala sekolah dan Operator BOS Kabupaten	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
30		Pelatihan bagi guru-guru SMP tentang akses dan penggunaan teknologi informasi	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SD	Mulai dari awal tahun
31		Pengawasan dan penegasan pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas siswa di SMP	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
32		Upaya kabid GTK untuk mempermudah kerja tim dalam verifikasi bahan sertifikasi	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang GTK	Mulai dari awal tahun
33		Pelaksanaan penerimaan PPDB SMP sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
34		Pengawasan oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SMP	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
35		Pemantauan langsung dari kepala sekolah dan Operator BOS Kabupaten	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Mulai dari awal tahun
36		Upaya pemantauan dan pengawasan langsung dari pimpinan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang GTK	Mulai dari awal tahun
37		Perlunya pengawasan dari kepala sekolah saat mengentrikan data-data sekolah dengan cepat, tepat, dan akurat	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
38		Upaya kabid PAUD Dikmas untuk mengusulkan tambahan dana untuk penerima bantuan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
39		Pengawasan dan penegasan dari kepala Opd kepada pihak-pihak terkait dalam menurunkan angka putus sekolah di kabupaten pessel	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
40		Mengevaluasi hasil pelatihan dan bimtek peningkatan kompetensi guru	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
41		Upaya kabid PAUD Dikmas untuk mengusulkan tambahan dana untuk penerima bantuan	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
42		Mengevaluasi hasil pelatihan guru Muatan lokal	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang SD	Mulai dari awal tahun
43		Melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum PAUD dan Nonformal	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang PAUDDIKMAS	Mulai dari awal tahun
44		Penyediaan data profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang GTK	Mulai dari awal tahun
45		Upaya Kabid Budaya untuk melakukan Kerja sama dengan Ninik Mamak/LKAM dan Pihak sekolah	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Budaya	Mulai dari awal tahun
46		Memasang alat CCTV di lokasi agar bisa dipantau setiap saat, melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya, dan mengadakan bimtek peningkatan juru pelihara cagar budaya	Pemantauan yang berkelanjutan	Kepala Bidang Budaya	Mulai dari awal tahun

